LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2024

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA MEDAN

KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA MEDAN
JL. SUKAMULIA NO. 17 A LANTAI 3
MEDAN – 20151

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024 dengan baik.

Penyusuan Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024 ini merupakan implementasi atas asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja/sasaran strategis KPP Madya Dua Medan pada tahun anggaran 2024 yang disusun dengan berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riview Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; serta Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

LAKIN merupakan instrumen penilaian kinerja dalam mencapai visi dan misi secara kuantitatif dan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Madya Dua Medan. LAKIN juga merupakan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Secara implementatif, LAKIN juga berperan sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak) telah menerapkan metode *Balanced Scorecard* (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Keberhasilan suatu organisasi dalam meningkatkan kinerja diantaranya dapat diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Pengukuran kinerja tersebut dilakukan atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran yang menjadi Sasaran Strategis (SS) sebagaimana telah ditetapkan pada Peta Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024. Sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak di daerah, KPP Madya Dua Medan juga menerapkan proses tersebut dan menjadi Perjanjian Kinerja KPP Madya Dua Medan Tahun 2024.

Selama tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategis Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan yang diterjemahkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan Tahun 2024 yang terdiri dari 19 Indikator Kinerja

Utama (IKU). Dalam Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan ini, akan dijabarkan hasil dan capaian atas pelaksanaan IKU, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan.

Di tengah dinamika dan ketidakpastian perekonomian global, serta tuntutan masyarakat yang sangat dinamis dan belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Direktorat Jenderal Pajak, maka tugas mengumpulkan penerimaan negara dirasakan semakin menantang. Namun demikian, dengan berlandaskan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta dengan motivasi yang tinggi dan komitmen bersama untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan berupaya untuk mengatasi segala tantangan tersebut, sehingga dapat menjalankan amanah yang telah diberikan.

Penyusunan LAKIN Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kinerja yang jelas dan transparan, sekaligus sebagai pertanggungjawaban terhadap kinerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab atas pencapaian visi dan misi yang diamanatkan, serta menjadi bahan analisis dan evaluasi untuk peningkatan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan di masa yang akan datang.

Medan, 24 Januari 2025
Kepala Kantor,

Ditandatangani secara elektronik
Meidijati

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kantor pelayanan publik mempunyai visi yang jelas, yaitu: **"Menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang terbaik dalam menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan dalam rangka mendukung visi Direktorat Jenderal Pajak"**. Dengan memperhatikan misi Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan, yaitu: **"Memberikan pelayanan berkualitas dan berstandarisasi, edukasi, dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil dengan menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan"**.

Visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan tersebut diaplikasikan ke dalam berbagai program kerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan, yaitu berupa pelayanan, komunikasi, dan edukasi; pengawasan dan penegakan hukum; pengelolaan keuangan, BMN, dan umum; serta pengelolaan organisasi dan SDM, dan lain sebagainya. Kemudian program kerja tersebut diharapkan dapat memenuhi sasaran yang hendak dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan berupa pemberian pelayanan yang prima kepada *stakeholders* yang bermuara kepada tercapainya target penerimaan pajak yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan.

Sebagaimana diamanatkan dalam APBN 2024, Anggaran Pendapatan Negara Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 2.802,3 triliun dengan penerimaan pajak direncanakan sebesar Rp 2.309,9 triliun atau tumbuh 6,3% dengan memperhitungkan berbagai faktor yang akan mendukung antara lain implementasi UU HPP, aktivitas ekonomi dalam negeri yang semakin membaik, serta upaya optimalisasi dari sisi administrasi maupun kepatuhan wajib pajak. Pendapatan negara dari sektor perpajakan menjadi penyumbang terbesar APBN, yaitu sebesar 82,42% dari total pendapatan. Sebagai konsekuensi, Direktorat Jenderal Pajak dituntut untuk dapat merealisasikan target penerimaan negara tersebut melalui kebijakan dan program kerja yang dapat mendukung terpenuhinya tanggung jawab besar yang telah diamanatkan. Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan primadona sumber penerimaan negara yang harus terus menerus digali dan ditingkatkan peranannya demi kesinambungan pembangunan.

Pajak merupakan pengejawantahan praktek demokrasi di mana rakyat berperan serta dalam membiayai negara dan pemerintahannya secara khusus untuk mewujudkan pembangunan nasional dengan kemandirian dalam pembiayaannya. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak, baik dari tingkat pusat sampai dengan unit operasional di

bawahnya, harus berupaya untuk terus menerus meningkatkan penerimaan pajak sekaligus memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Dalam hal ini, KPP Madya Dua Medan sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2023 diberikan tanggung jawab untuk merealisasikan penerimaan pajak (PPh, PPN, dan pajak lainnya) tahun 2024 sebesar Rp 7.954.197.084.000.

Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan memiliki tujuan untuk mendorong optimalisasi kepatuhan formal dan kepatuhan pembayaran wajib pajak, memberikan pelayanan prima yang berkualitas dan memenuhi standar, membangun masyarakat yang sadar dan peduli pajak, serta menjadi menjadi organisasi yang akuntabel dan transparan.

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis ini didukung dengan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

1. Persentase realisasi penerimaan pajak;
2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas;
3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM);
4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis;
5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM);
6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan;
7. Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan;
8. Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis;
9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis;
10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan;
11. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu;
12. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian;
13. Tingkat efektivitas penagihan;
14. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan;
15. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan produksi Alat Keterangan;
16. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM;
17. Indeks Penilaian Integritas Unit;
18. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko; dan
19. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2024, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan mencapai 109,69, yaitu dengan kategori “Istimewa”. Secara umum, capaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan sudah baik, dengan mayoritas IKU sudah mencapai atau melebihi target. Pada tahun 2024, terdapat 18 IKU telah mencapai atau melebihi target atau berwarna hijau dan 1 IKU dengan capaian di bawah target atau berwarna kuning. 1 IKU berwarna kuning tersebut adalah Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Capaian penerimaan KPP Madya Dua Medan tahun 2024 telah melampaui target yang diamanahkan, yaitu Rp 7.979.324.888.326 atau 100,32%. Pencapaian tersebut adalah berkat kerja sama antar pegawai dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab, serta dukungan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, perangkat peraturan perundang-undangan perpajakan, kebijakan mulai dari tingkat pusat hingga kanwil, dan dukungan pihak lainnya.

LAKIN ini diharapkan berfungsi sebagai kontrol/alat uji kinerja secara kuantitatif dalam rangka terwujudnya transparansi menuju terciptanya *good governance*. Selain itu, LAKIN ini juga dapat digunakan sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit di lingkungan KPP Madya Dua Medan secara bertahap dan berkesinambungan. Dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan akan terus berupaya membangun budaya organisasi yang lebih transparan dan akuntabel dengan berpedoman pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, Kode Etik Pegawai dan Perilaku Disiplin PNS agar kepercayaan publik terhadap instansi perpajakan meningkat.

DAFTAR ISI

BAB I 2

PENDAHULUAN 2

A. Latar Belakang 2

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 2

C. Sistematika Pelaporan 6

BAB II 8

PERENCANAAN KINERJA 8

A. Perencanaan Strategis 8

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 9

BAB III 13

AKUNTABILITAS KINERJA 13

A. Capaian Kinerja Organisasi 13

B. Realisasi Anggaran 29

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 30

D. Kinerja Lain-Lain 30

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 32

BAB IV 33

PENUTUP 33

LAMPIRAN 34

BAB I
PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Madya Dua Medan yang berada dibawah Lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara I, memiliki kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi sebagai berikut:

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua medan Tahun 2024 dalam upaya mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan Tahun 2024, selanjutnya disebut Lakin, akan menampilkan capaian yang berhasil diraih KPP Madya Dua Medan pada tahun 2024, khususnya capaian target penerimaan pajak yang menjadi *core* bisnis dari Kantor Pelayanan Pajak.

KPP Madya Dua Medan telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran pada tahun 2024. Pada tahun 2024 KPP Madya Dua Medan berhasil menunaikan tugasnya untuk mengumpulkan Rp 7.954.197.084.000 penerimaan pajak. Namun, keberhasilan tersebut tidak dicapai dengan mudah, terdapat permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam usaha pencapaian target tersebut. Adapun permasalahan yang dihadapi meliputi:

1. tingginya nilai restitusi;
2. restitusi yang tidak terduga sehingga deviasi kas dapat keluar dari ambang batas;
3. kemampuan bayar Wajib Pajak yang rendah dan kondisi Wajib Pajak yang sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga mempengaruhi penerimaan KPP;
4. kurangnya bahan baku PKM Pengawasan.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas

Berdasarkan Pasal 57 A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Madya Dua Medan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak

Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Berdasarkan Pasal 57 B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dalam melaksanakan tugas, KPP Madya Dua Medan menyelenggarakan fungsi:

a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
b. edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
c. pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
d. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
e. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
f. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
g. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
h. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
i. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
j. pemutakhiran basis data perpajakan;
k. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
l. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
m. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
n. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
o. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
p. pelaksanaan administrasi kantor.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 57 C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, struktur organisasi KPP Madya Dua Medan terdiri atas:

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
c. Seksi Pelayanan;
d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
e. Seksi Pengawasan I;

f. Seksi Pengawasan II;
g. Seksi Pengawasan III;
h. Seksi Pengawasan IV;
i. Seksi Pengawasan V;
j. Seksi Pengawasan VI; dan
k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan

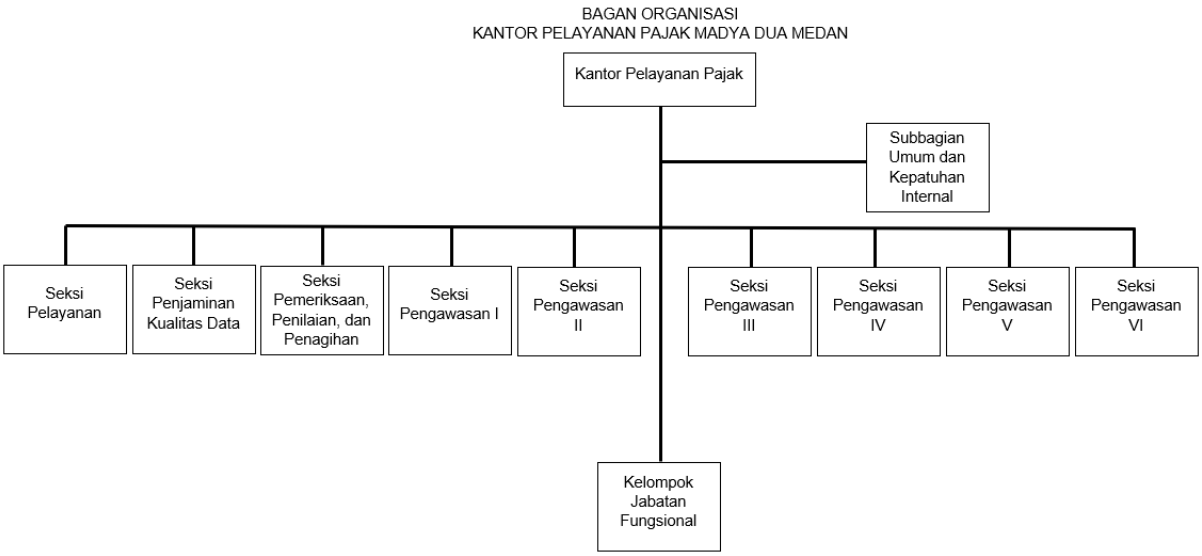

Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan KPP Madya Dua Medan berjumlah 124 pegawai. Jumlah SDM ini juga didukung dengan adanya 9 elemen pendukung yang terdiri dari 6 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), 2 *Cleaning Service*, dan 1 Satuan Pengamanan (Satpam). Adapun penjelasan Sumber Daya Manusia KPP Madya Dua Medan adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan jenis kelamin

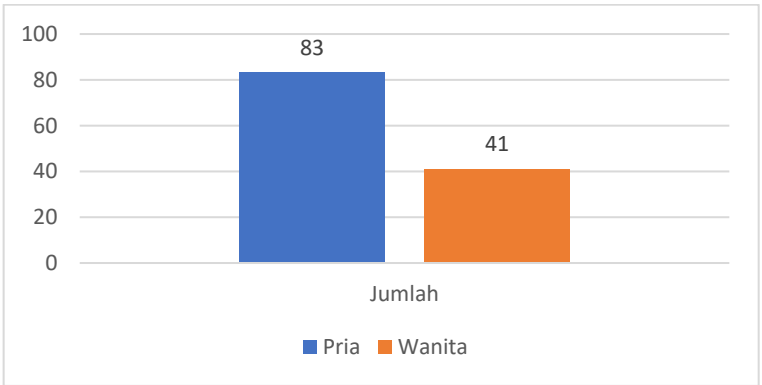

Sumber: Aplikasi SIKKA (https://sikka-djp/)

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

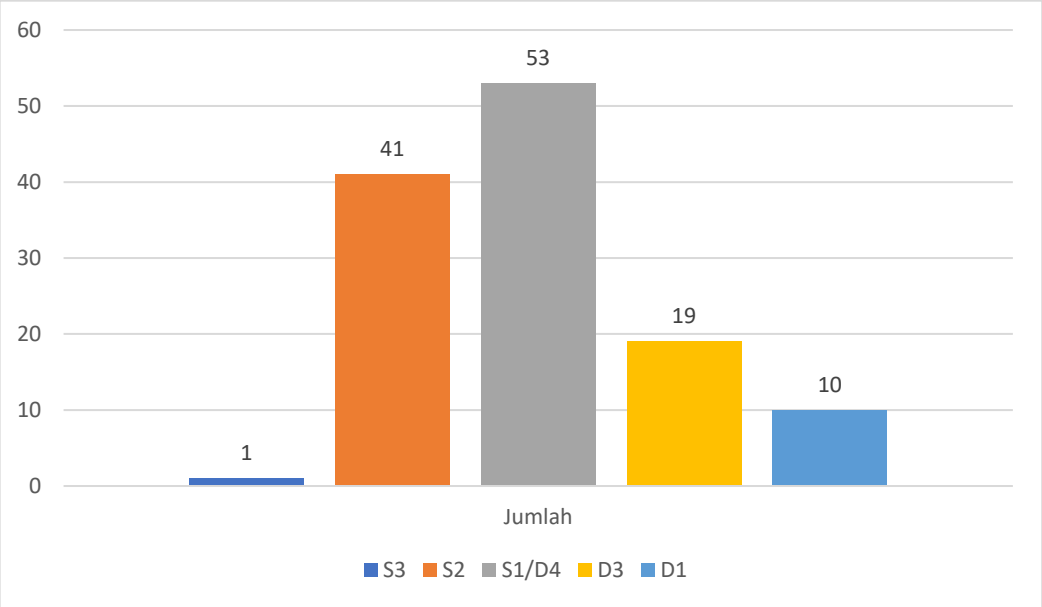

Sumber: Aplikasi SIKKA (https://sikka-djp/)

c. Berdasarkan Jabatan

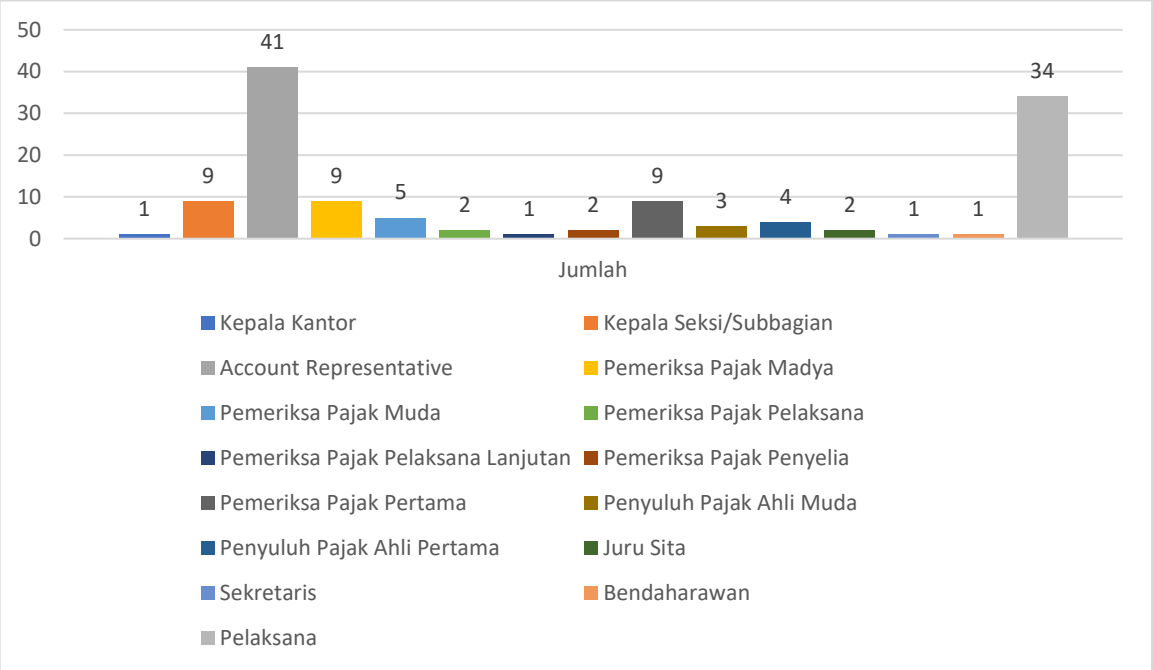

Sumber: Aplikasi SIKKA (https://sikka-djp/)

d. Berdasarkan Seksi/Subbagian

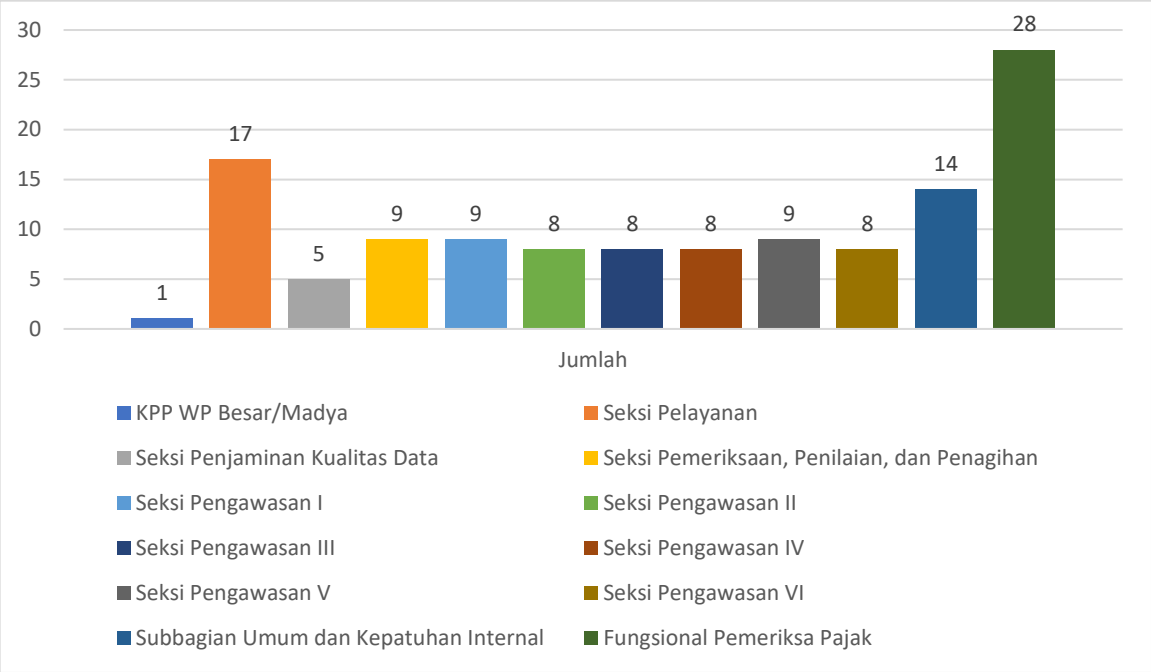

Sumber: Aplikasi SIKKA (https://sikka-djp/)

C. Sistematika Pelaporan

Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024 ini disusun memenuhi ketentuan pelaporan sesuai petunjuk pada Nota Dinas Direktorat Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, sehingga LAKIN tahun 2024 KPP Madya Dua Medan ini disusun dengan uraian sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaiannya.

Bab I	Pendahuluan Pada bab ini disajikan secara singkat mengenai latar belakang; tugas, fungsi dan struktur organisasi dan penjelasan umum organisasi serta sistematika pelaporan.
Bab II	Perencanaan Kinerja Pada bab ini disajikan penjelasan secara rinci mengenai Rencana Strategis (Renstra), serta ringkasan/ikhtisar penyusunan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
Bab III	Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi

	Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024. D. Kinerja Lain-Lain Pada subbab ini diuraikan penghargaan yang diterima oleh organisasi. E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pada subbab ini diuraikan program evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.
Bab IV	Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Lampiran	Formulir Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Pemerintah dan sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, pelaporan LAKIN di setiap instansi perlu menjelaskan secara detail bagaimanakah pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggarannya melalui sasaran strategis dan rincian kegiatan. Tujuan instansi atau organisasi melalui rencana strategis merupakan penjabaran serta perencanaan berskala besar (disebut Perencanaan Strategis) yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (disebut VISI) dan ditetapkan sebagai keputusan manajemen puncak (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil) agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (disebut MISI), dalam usaha menghasilkan sesuatu (Perencanaan Operasional) yang berkualitas dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan (disebut tujuan strategis) dan berbagai sasaran (Tujuan Operasional) organisasi sebagaimana digambarkan pada bagan di bawah ini:

Piramida Penyelarasan Strategi Kementerian Keuangan

Sumber: KMK-467/KMK.01/2014

KPP Madya Dua Medan menjalankan tugas dan fungsinya mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024. Dalam rangka mencapai tujuannya, Sasaran Strategi Direktorat Jenderal Pajak 2020 – 2024 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel II.1 Tabel Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pajak 2020 – 2024

No	Sasaran Strategis
1	Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif
2	Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
3	Sasaran startegis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah: a. Organisasi dan SDM yang optimal b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian/penetapan kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan/perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Penetapan/perjanjian kinerja di lingkungan KPP Madya Dua Medan telah dilakukan dengan menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC). Metode BSC digunakan sebagai instrumen perencanaan kinerja di lingkungan KPP Madya Dua Medan yang dituangkan menjadi Sasaran Strategis. Sasaran Strategis adalah faktor utama yang dikembangkan menjadi ukuran-ukuran strategis (Indikator Kinerja Utama/IKU) dan targetnya. Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target yang dimaksud secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPP Madya Dua Medan harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Peta Strategi KPP Madya Dua Medan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Peta Sasaran Strategis KPP Madya Dua Medan

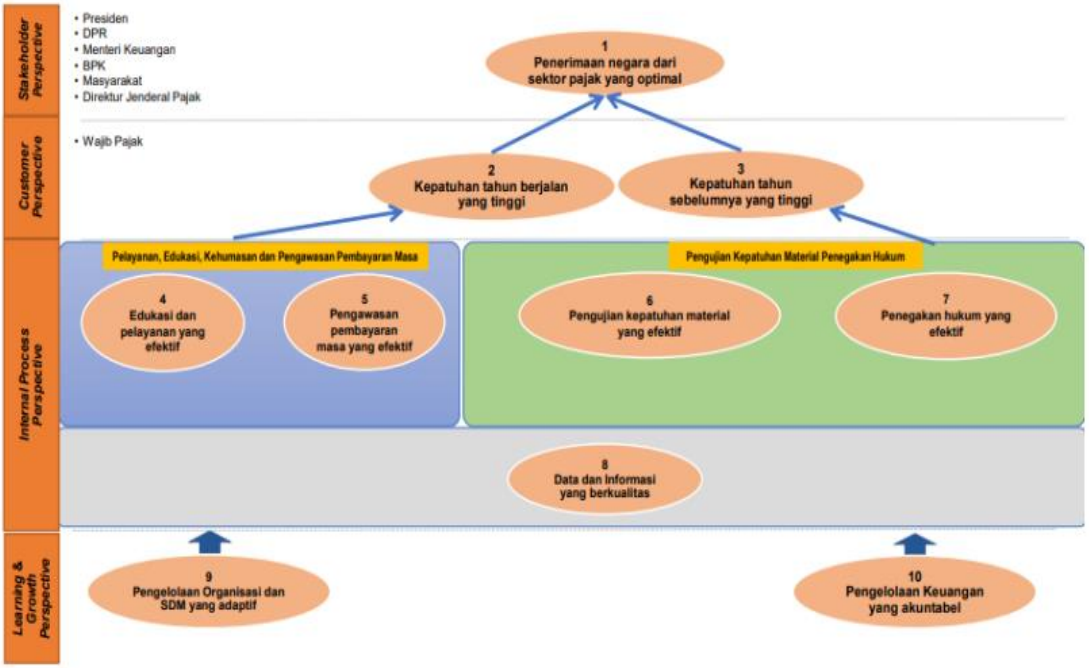

Peta Strategis di atas menggunakan *Balanced Scorecard* (BSC) yang yang menerapkan empat perspektif, yaitu: *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning & Growth Perspective*. Empat perspektif tersebut kemudian diuraikan ke dalam 10 Sasaran Strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama yang diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), Target, dan Realisasi Tahun 2024

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi
1		*2*		*3*	*4*
Stakeholder Perspective					
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,32%
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	97,80
Customer Perspective					

2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,31%
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis	100,00%	118,08%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,37%
Internal Process Perspective					
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%
		4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	116,99%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90,00%	119,31%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100,00%	120,00%

		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%
		6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	120,00%
7	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%
		7b-CP	Tingkat efektivitas Penagihan	75,00%	108,31%
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%
8	Data dan informasi yang berkualitas	8a-N	Persentase penyelesaian laporan pengamatan	100%	120,00%
Learning & Growth Perspective					
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,47
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	94,60
		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00
10	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00

Sumber: KPP Madya Dua Medan (2024)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-12/PJ/2018 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tahapan akhir dari pengelolaan kinerja adalah proses penilaian, monitoring, dan evaluasi kinerja. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh dengan menghitung data target dan realisasi IKU yang tersedia.

Pengukuran capaian kinerja KPP Madya Dua Medan Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Berdasarkan hasil evaluasi, Capaian Kinerja Organisasi KPP Madya Dua Medan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel Nilai Kinerja Organisasi berikut:

Nilai Kinerja Organisasi

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
	Stakeholder Perspective						30,00%	99,25
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							99,25
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,32%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,32
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	97,80	Max	P/L	19,00%	42,22%	97,80
	Customer Perspective						20,00%	104,09
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							107,81
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,31%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,31
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	118,08%	Max	P/L	19,00%	42,22%	118,08
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,37
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,37%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,37
	Internal Process Perspective						25,00%	119,70
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							118,50
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	116,99%	Max	E/M	21,00%	50,00%	116,99
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90,00%	119,31%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							120,00
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif							120,00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	108,31%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
	Learning & Growth Perspective						25,00%	116,64
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,28
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,47	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,47
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	94,60	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,30
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
	Nilai Kinerja Organisasi							109,69

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

Secara umum, KPP Madya Dua Medan memperoleh predikat istimewa atas capaian Nilai Kinerja Organisasi di tahun 2024, di mana dari 19 Indikator Kinerja Utama terdapat 18 Indikator Kinerja Utama yang indeks capaiannya mencapai 100% atau lebih.

Perkembangan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Madya Dua Medan dari tahun 2021 sampai dengan 2024 dapat digambarkan sebagaimana grafik di bawah ini:

Grafik Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2021 s.d. 2024

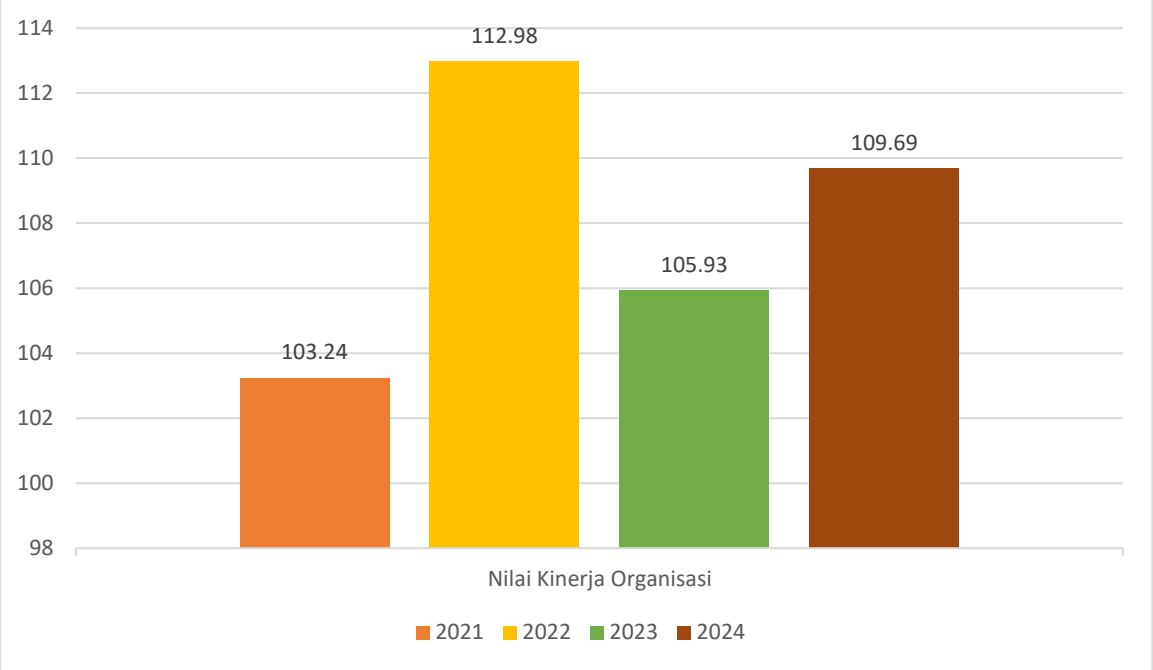

Sejak mulai beroperasi pada tahun 2021, NKO KPP Madya Dua Medan mengalami fluktuasi dengan NKO tertinggi pada tahun 2022 sebesar 112.98. Meski sempat turun pada tahun 2023 menjadi 105.93, NKO kembali naik pada tahun 2024 menjadi 109.69.

Selama tahun 2024, dari 19 IKU yang dimiliki KPP Madya Dua Medan, terdapat 18 IKU berwarna hijau dan 1 IKU berwarna kuning (Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas). Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. **Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal**

   Persentase realisasi penerimaan pajak (1a-CP)

Nama Unit	1 Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal							
	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	19.39%	38.44%	38.44%	68.52%	68.52%	100.32%	100.32%	
Capaian	84.30	76.88	76.88	91.36	91.36	100.32	100.32	

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Detail realisasi penerimaan pajak tahun 2024

Kinerja Penerimaan

TAHUN 2024 BULAN Januari SAMPAI Desember UNIT KPP Se-KANWIL URUT Pencapaian Perhitungan Total Lihat Data

DOWNLOAD PENYESUAIN PERTUMBUHAN

No.	KANWIL/KPP	TARGET	PENERIMAAN TAHUN BERJALAN								PENERIMAAN TAHUN LALU		PENCAPAIAN	PERTUMBUHAN	
			MPN	DOLLAR	SPM	PBK KIRIM	PBK TERIMA	BRUTO	SPMKP	NETTO	BRUTO	NETTO		BRUTO	NETTO
1	PRATAMA BINJAI	719,588,572,000	711,317,080,523	0	24,578,979,226	-6,341,614,657	6,373,751,502	735,928,196,594	11,886,316,335	724,041,880,259	677,008,568,531	670,224,111,829	100.62	8.7	8.03
2	PRATAMA MEDAN PETISAH	1,184,133,743,000	1,326,696,421,324	0	108,195,124,133	-15,671,643,095	14,218,001,724	1,433,437,904,086	245,381,766,399	1,188,056,137,687	1,344,588,451,056	1,180,803,141,117	100.33	6.61	.61
3	MADYA DUA MEDAN	7,954,197,084,000	10,152,104,467,898	14,865,190,122	42,266,428,504	-48,605,540,783	49,983,743,287	10,210,614,288,532	2,231,289,400,198	7,979,324,888,326	10,375,035,178,450	8,927,938,999,944	100.32	-1.58	-3.02
4	PRATAMA MEDAN TIMUR	870,313,047,000	1,019,899,424,064	0	21,111,424,553	-7,845,347,743	10,280,166,952	1,043,445,667,826	171,152,023,377	872,293,644,449	829,548,936,917	685,008,346,724	100.23	25.78	27.34
5	PRATAMA MEDAN POLONIA	2,152,210,275,000	2,045,257,262,290	0	242,385,527,100	-15,256,820,898	13,353,232,971	2,285,739,201,463	129,457,233,896	2,156,281,967,567	1,663,697,906,990	1,535,054,346,028	100.19	37.39	40.47
6	PRATAMA MEDAN BARAT	2,403,370,865,000	2,041,822,092,991	0	400,285,851,005	-11,261,211,917	10,959,888,958	2,441,806,621,037	33,975,313,549	2,407,831,307,488	1,999,576,591,768	1,944,571,927,703	100.19	22.12	23.82
7	PRATAMA LUBUK PAKAM	1,619,480,224,000	1,710,544,256,880	0	67,974,179,408	-20,800,996,872	17,647,445,196	1,775,364,884,612	152,885,390,131	1,622,479,494,481	1,590,918,631,456	1,517,685,460,380	100.19	11.59	6.9
8	MADYA MEDAN	9,168,955,886,000	13,102,710,433,196	3,055,018,888	89,717,365,670	-102,945,924,208	107,396,866,463	13,199,933,760,011	4,021,897,516,968	9,178,036,243,043	14,695,775,009,198	11,033,701,916,796	100.1	-10.18	-16.82
9	PRATAMA MEDAN BELAWAN	1,127,804,086,000	1,121,376,677,351	0	23,190,632,334	-24,905,161,595	25,907,940,792	1,145,570,088,882	16,929,356,598	1,128,640,732,284	1,004,098,028,245	993,586,885,572	100.07	14.09	13.59
10	PRATAMA MEDAN KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
	Jumlah	27,200,053,782,000	33,231,728,116,017	17,920,209,010	1,019,705,511,929	-253,634,261,768	256,121,037,847	34,271,840,613,035	7,014,854,317,451	27,256,986,295,584	34,180,237,302,711	27,788,574,536,093	100.21	0.27	-1.91

Sumber: Aplikasi Appportal DJP (https://appportal/portal/login/)

Realisasi penerimaan pajak KPP Madya Dua Medan pada tahun 2024 adalah 100,32% dengan nilai total Rp 7.979.324.888.326 dari target Rp 7,954.197.084.000, sehingga indeks capaian IKUnya adalah 100,32. Tindakan yang telah dilakukan untuk merealisasikan IKU tersebut adalah:

a. Melakukan kegiatan pengawasan pembayaran masa atas penerbitan STP, dinamisasi angsuran PPh Pasal 25, dan matching data;
b. Melakukan pengawasan kegiatan penelitian kepatuhan material terhadap pemanfaatan data pemicu, pembuatan LHPt komprehensif sampai dengan penerbitan LHP2DK dan tindak lanjut SP2DK outstanding.

Realisasi penerimaan pajak selama 4 tahun terakhir:

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	88,87%	124,41%	101,40%	100,32%

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100,32%

Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,32%

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas (1b-CP)

Nama Unit	1 Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal							
	01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Realisasi	103.36	97.78	97.78	91.50	91.50	97.80	97.80	
Capaian	103.36	97.78	97.78	91.50	91.50	97.80	97.80	

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungakan adalah maksimal 120%. Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas KPP Madya Dua Medan adalah 97,80. IKU tersebut merupakan satu-satunya IKU yang tidak tercapai pada tahun 2024. Adapun akar masalah yang menjadi penyebab IKU tersebut tidak tercapai adalah sebagai berikut:

a. kemampuan bayar Wajib Pajak yang rendah dan kondisi Wajib Pajak yang sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga mempengaruhi penerimaan KPP;
b. terdapat penerimaan negara dan restitusi yang tidak terduga sehingga deviasi kas dapat keluar dari ambang batas;
c. penyusunan target penerimaan KPP yang membutuhkan waktu;

d. mutasi pegawai yang menyebabkan pegawai membutuhkan waktu untuk mengetahui proses bisnis Wajib Pajak dan sinkronisasi assign wajib pajak dengan aplikasi Approweb;
e. kekurangan Bahan Baku PKM Pengawasan

Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. melakukan Penyelesaian terhadap Daftar Sasaran dalam DSP4 sehingga menghasilkan penerimaan bagi KPP;
b. menghimbau Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan;
c. melakukan Rapat perhitungan Prognosa penerimaan dan restitusi secara efektif agar nilai deviasi kas masih dalam ambang batas;
d. melakukan Bedah WP strategis;
e. melakukan pengawasan PPM.

Rencana aksi tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

a. melakukan Penyelesaian terhadap Daftar Sasaran dalam DSP4 sehingga menghasilkan penerimaan bagi KPP;
b. menghimbau Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan;
c. melakukan Perhitungan Prognosa penerimaan dan restitusi secara efektif agar nilai deviasi kas masih dalam ambang batas;
d. melakukan Bedah WP strategis;
e. melakukan pengawasan PPM dan PKM.

Realisasi IKU selama 4 tahun terakhir:

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	110,01%	109,20%	-	-
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	108,38%	97,80%

2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) (2a-CP)

Nama Unit	2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	23.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%	
Realisasi	20.05%	39.05%	39.05%	69.71%	69.71%	100.31%	100.31%	
Capaian	87.17	78.10	78.10	92.95	92.95	100.31	100.31	

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) KPP Madya Dua Medan adalah 100,31% dengan nilai total Rp 7.314.522.578.468 dari target

sebesar Rp 7.291.861.167.000 sehingga capaian IKUnya sebesar 100,31. Tindakan yang telah dilakukan selama tahun 2024 untuk merealisasikan IKU tersebut adalah:

a. meneliti dan menerbitkan SP2DK atas potensi kegiatan matching data;
b. menerbitkan LHP2DK atas realisasi pembayaran pajak dari kegiatan matching data;
c. menyusun Dafnom status suspend (penonaktifan akun sertifikat elektronik) atas PKP yang memenuhi kriteria PER-04/PJ/2020 dan SE-17/PJ/2018.

Realisasi IKU selama 4 tahun terakhir:

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	89,42%	124,81%	105,34%	100,31%

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi (2b-CP)

Nama Unit	2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
	02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	60.00%	80.00%	80.00%	90.00%	90.00%	100.00%	100.00%	
Realisasi	100.50%	115.93%	115.93%	117.79%	117.79%	118.08%	118.08%	
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	118.08	118.08	

Realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi KPP Madya Dua Medan adalah sebesar 118,08% dan capaian sebesar 118,08. Tindakan yang telah dilakukan selama tahun 2024 untuk merealisasikan IKU tersebut adalah:

a. penyampaian surat dan WA Blast himbauan SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan;
b. melaksanakan kegiatan penyuluhan langsung secara aktif dengan tema Pengisian SPT Tahunan Badan dan/atau OP;
c. mengirimkan surat imbuan pelaporan SPT tahunan tahun 2023;
d. menghubungi WP melalui telepon/handphone.

Realisasi IKU selama 4 tahun terakhir:

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	99,65%	100,00%	100,05%	118,08%

3. **Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi**

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) (3a-CP)

Nama Unit	3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%	
Realisasi	12.59%	32.18%	32.18%	58.01%	58.01%	100.37%	100.37%	
Capaian	50.36	64.36	64.36	77.35	77.35	100.37	100.37	

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) KPP Madya Dua Medan adalah sebesar 100,37% dengan capaian 100,37. Tindakan yang telah dilakukan selama tahun 2024 untuk merealisasikan IKU tersebut adalah:

a. inventarisir Saldo SP2DK awal Januari 2023 dan membuat target penyelesaiannya per AR;
b. tindak lanjut program PASTI untuk WP Piloting;
c. menyusun DPP sesuai SE-05/PJ/2022 setiap semester;
d. mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi setiap bulan;
e. melakukan Usulan Pemeriksaan;
f. penyelesaian SP2DK *outstanding*.

Realisasi IKU selama 4 tahun terakhir:

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	75,44%	118,66%	62,51%	100,37%

4. **Edukasi dan pelayanan yang efektif**

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan (4a-CP)

Nama Unit	4 Edukasi dan pelayanan yang efektif							
	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	10.00%	40.00%	40.00%	60.00%	60.00%	74.00%	74.00%	
Realisasi	10.41%	100.00%	100.00%	88.80%	88.80%	88.80%	88.80%	
Capaian	104.10	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	

Realisasi persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan KPP Madya Dua Medan adalah sebesar 88,80% dari target sebesar 74,00% dengan capaian 120,00. Tindakan yang telah dilakukan selama tahun 2024 untuk merealisasikan IKU tersebut adalah melaksanakan Sosialisasi terkait dengan aturan-aturan perpajakan terbaru, visit ke Wajib Pajak, dan himbauan di Media Sosial untuk mengingatkan pemahaman Wajib Pajak terkait dengan aturan perpajakan

Realisasi IKU selama 4 tahun terakhir:

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	80,40%	80,40%	-	-
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	84,00%	88,80%

Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan (4b-N)

Nama Unit	4 Edukasi dan pelayanan yang efektif							
	04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	5.00%	5.00%	10.00%	5.00%	15.00%	85.00%	100.00%	
Realisasi	6.22%	6.39%	6.39%	6.00%	18.00%	116.99%	116.99%	
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	116.99	

Realisasi indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan KPP Madya Dua Medan adalah 116,99% dengan capaian 116,99. Tindakan yang telah dilakukan selama tahun 2024 untuk merealisasikan IKU tersebut adalah memberikan edukasi dan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan sebaik-baiknya.

Realisasi IKU selama 4 tahun terakhir:

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	94,63	89,75	81,99	-
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	-	-	-	116,99

5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif

Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis (5a-CP)

Nama Unit	5 Pengawasan Pembayaran Masa Yang Efektif							
	05a-CP Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	
Realisasi	120.00%	120.00%	120.00%	111.64%	111.64%	119.31%	119.31%	
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

Realisasi persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis KPP Madya Dua Medan adalah sebesar 119,31% dari target 90,00% dengan capaian 120,00. Tindakan yang telah dilakukan selama tahun 2024 untuk merealisasikan IKU tersebut adalah:

a. menindaklanjuti dafnom STP yang terdapat pada aplikasi dan menerbitkan STP yang sesuai dengan kriteria IKU;

b. menindaklanjuti data matching;

c. menindaklanjuti data pemicu dengan menerbitkan LHPt dan SP2DK;

d. menerbitkan LHP2DK tahun berjalan.

Realisasi IKU selama 4 tahun terakhir:

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	100,00%	112,63%	120,00%	119,31%

6. Pengujian kepatuhan material yang efektif

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis (6a-CP)

Nama Unit	6 Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	10.00%	40.00%	40.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%	
Realisasi	N/A	120.00%	120.00%	90.00%	90.00%	120.00%	120.00%	
Capaian	N/A	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis. Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis KPP Madya Dua Medan adalah 120,00% dengan capaian 120,00. Tindakan yang telah dilakukan selama tahun 2024 untuk merealisasikan IKU tersebut adalah:

a. menindaklanjuti data pemicu;

b. menyusun dan mengusulkan DPP;

c. menerbitkan LHPt & SP2DK Komprehensif WP Strategis sesuai dengan DPP 2024;

d. penerbitan SP2DK;

e. penerbitan LHP2DK;

f. menindaklanjuti SP2DK outstanding;

g. menerbitkan LHPt tindak lanjut atas data konkret

Realisasi IKU selama 4 tahun terakhir:

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	119,66%	174,93%	120,00%	120,00%

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan (6b-N)

Nama Unit	6 Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	06b-N Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Realisasi	120.00%	109.16%	109.16%	119.89%	119.89%	120.00%	120.00%	
Capaian	120.00	109.16	109.16	119.89	119.89	120.00	120.00	

Realisasi persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan KPP Madya Dua Medan adalah sebesar 120,00% dengan capaian 120,00. Tindakan yang telah dilakukan selama tahun 2024 untuk merealisasikan IKU tersebut adalah:

a. menerbitkan STP atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
b. menindaklanjuti data pemicu.

Realisasi IKU selama 4 tahun terakhir:

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	120,00%	120,00%

**IKU baru ada di tahun 2023*

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (6c-N)

Nama Unit	6 Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Realisasi	120.00%	120.00%	120.00%	111.51%	111.51%	120.00%	120.00%	
Capaian	120.00	120.00	120.00	111.51	111.51	120.00	120.00	

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Realisasi efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu KPP Madya Dua Medan adalah sebesar 120,00% dengan capaian 120,00. Tindakan yang telah dilakukan selama tahun 2024 untuk merealisasikan IKU tersebut adalah:

a. melaksanakan Rapat Komite Kepatuhan KPP secara rutin setiap bulan;

b. melakukan penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak tepat waktu agar pencapaian IKU Maksimal;
c. mengawasi pelaksanaan DSP4 Kolaboratif;
d. menyampaikan Notula Rapat Komite Kepatuhan KPP yang telah dilaksanakan kepada Kanwil;
e. menetapkan Berita Acara persetujuan Daftar Sasaran dalam DSP4 Kolaboratif.

Realisasi IKU selama 4 tahun terakhir:

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	120,00%

**IKU baru ada di tahun 2024*

7. Penegakan hukum yang efektif

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian (7a-CP)

Nama Unit	7 Penegakan Hukum yang Efektif							
	07a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Realisasi	72%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	
Capaian	72.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian KPP Madya Dua Medan adalah sebesar 120,00% dengan capaian 120,00. Tindakan yang telah dilakukan selama tahun 2024 untuk merealisasikan IKU tersebut adalah:

a. melakukan Manajemen Restitusi;
b. koordinasi terhadap Seksi Pelayanan terkait Prognosa Restitusi;
c. melakukan monitoring terhadap pemeriksaan Lebih Bayar yang akan diterbitkan.

Realisasi IKU selama 4 tahun terakhir:

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan	76,57%	109,49%	86,91%	-
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	-	120,00%

Tingkat efektivitas penagihan (7b-CP)

Nama Unit	7 Penegakan Hukum yang Efektif							
	07b-CP Tingkat efektivitas penagihan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	15.00%	30.00%	30.00%	45.00%	45.00%	75.00%	75.00%	
Realisasi	31.46%	54.37%	54.37%	91.06%	91.06%	108.31%	108.31%	
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

a. variabel tindakan penagihan (50%);
b. variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
c. variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

Realisasi tingkat efektivitas penagihan KPP Madya Dua Medan adalah sebesar 108,31% dari target 75,00%, sehingga capaian sebesar 120,00. Tindakan yang telah dilakukan selama tahun 2024 untuk merealisasikan IKU tersebut adalah:

a. mencari alamat Wajib Pajak melalui data NIK yang terdapat dalam aplikasi Apportal;
b. menerbitkan SPMP dalam rangka pelaksanaan tindakan penagihan aktif berikutnya (Blokir, Sita, maupun Pencegahan);
c. melakukan konfirmasi terkait kepemilikan asset Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Realisasi IKU selama 4 tahun terakhir:

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Efektivitas penagihan	94,59%	-	-	-
Tingkat efektivitas penagihan	-	90,31%	118,16%	108,31 %

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan (7c-N)

Nama Unit	7 Penegakan Hukum yang Efektif							
	07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%	
Realisasi	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	200.00%	200.00%	
Capaian	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	

Realisasi persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan KPP Madya Dua Medan adalah sebesar 200,00% dengan capaian 120,00. Tindakan yang telah dilakukan selama tahun 2024 untuk merealisasikan IKU tersebut adalah:

a. menerbitkan LHP2DK dengan usulan Pemeriksaan;
b. menginput LHP2DK pada portal P2 jika belum otomatis muncul pada portal P2;
c. mengirimkan nota dinas kepada seksi Pemeriksaan.

Realisasi IKU selama 4 tahun terakhir:

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	200,00%

**IKU baru ada di tahun 2024*

8. Data dan informasi yang berkualitas

Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan (8a-CP)

Nama Unit	8 Data dan Informasi yang berkualitas							
	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	25.00%	50.00%	50.00%	80.00%	80.00%	100.00%	100.00%	
Realisasi	36.75%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Realisasi persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan KPP Madya Dua Medan adalah sebesar 120,00% dengan capaian 120,00. Tindakan yang telah dilakukan selama tahun 2024 untuk merealisasikan IKU tersebut adalah:

a. IHT Pengamatan dan KPDL;
b. menerbitkan surat perintah pengamatan;
c. tindak lanjut penyelesaian laporan pengamatan di bawah 3 bulan sejak tanggal surat perintah;
d. penerbitan laporan Alket berdasarkan data faktur WP.

Realisasi IKU selama 4 tahun terakhir:

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan	-	-	120,00%	-
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	-	-	-	120,00%

**IKU baru ada di tahun 2023*

9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM (9a-N)

Nama Unit	9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Realisasi	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	117.47	117.47	
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	117.47	117.47	

Realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM KPP Madya Dua Medan adalah sebesar 117,47 dengan capaian 117,47. Tindakan yang telah dilakukan selama tahun 2024 untuk merealisasikan IKU tersebut adalah:

a. monitoring nilai *assessment center* secara manual kepada pejabat struktural yang mengikuti assessment dikarenakan nilai assessment melekat pada aplikasi HRIS masing-masing pegawai;
b. monitoring database kepegawaian sikka terhadap pegawai yang akan mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang dan jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional Penyuluh dan Asisten Penyuluh Pajak, Fungsional Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak, dan Pelaksana Umum yang berpotensi untuk naik peringkat dan jabatan Tahun 2024;
c. melaksanakan kegiatan Bintal;
d. mengimbau Pegawai untuk menyelesaikan e-learning studi-A paling lambat 19 Mei 2024 agar mendapat poin yang maksimal.

Realisasi IKU selama 4 tahun terakhir:

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi	88,89%	100,00%	100,00%	-
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	-	117,47%

Indeks Penilaian Integritas Unit (9b-N)

Nama Unit	9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	N/A	N/A	N/A	85.00	85.00	85.00	85.00	
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100.00	100.00	94.60	94.60	
Capaian	N/A	N/A	N/A	117.65	117.65	111.29	111.29	

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

a. pelayanan perpajakan;
b. pengawasan kepatuhan;
c. pemeriksaan pajak;
d. penagihan pajak.

Realisasi indeks penilaian integritas unit KPP Madya Dua Medan adalah sebesar 94,60 dari target 85,00 dengan capaian 111,29. Tindakan yang telah dilakukan selama tahun 2024 untuk merealisasikan IKU tersebut adalah menginventarisir nama-nama Wajib

Pajak calon responden dengan berkoordinasi bersama Seksi Pelayanan, Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, dan Seksi Pengawasan.

Realisasi IKU selama 4 tahun terakhir:

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	95,65	95,25	89,97	94,60

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko (9c-N)

Nama Unit	9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	23.00	47.00	47.00	70.00	70.00	90.00	90.00	
Realisasi	23.63	50.12	50.12	87.06	87.06	100.00	100.00	
Capaian	102.74	106.64	106.64	120.00	120.00	111.11	111.11	

Realisasi indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko KPP Madya Dua Medan adalah sebesar 100,00 dari target 90,00 dengan capaian sebesar 111,11. Tindakan yang telah dilakukan selama tahun 2024 untuk merealisasikan IKU tersebut adalah:

a. melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi sebelum tanggal 20 setelah berakhirnya triwulan;
b. melaksanakan dan memantau pelaksanaan rencana kegiatan Mitigasi Risiko yang telah ditetapkan.

Realisasi IKU selama 4 tahun terakhir:

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan	99,89%	100,00%		
Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko			100%	-
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	-	100,00

10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran (10a-CP)

Nama Unit	10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Realisasi	120.00	104.35	104.35	120.00	120.00	120.00	120.00	
Capaian	120.00	104.35	104.35	120.00	120.00	120.00	120.00	

Realisasi indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran KPP Madya Dua Medan adalah sebesar 120,00 dari target 100,00 dengan capaian 120,00. Tindakan yang telah

dilakukan selama tahun 2024 untuk merealisasikan IKU tersebut adalah melakukan Revisi Halaman III DIPA pada saat rencana penarikan dana (RPD).

Realisasi IKU selama 4 tahun terakhir:

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	97,56	93,73	-	-
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	118,50	120,00

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024, KPP Madya Dua Medan mendapatkan anggaran DIPA (015) dan realisasi anggaran satuan kerja sebagaimana terlampir:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **KEMENTERIAN KEUANGAN 015**
ESELON I : **DITJEN PAJAK 04**
SATUAN KERJA : **KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA MEDAN 635595**

Tgl Data : 23/01/25 6:54 AM
Tgl Cetak : 23/01/25 1:50 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Pendapatan Perpajakan	**7,845,556,906,000**	**6,759,927,387,971**	**(1,085,629,518,029)**	**86**	**8,114,166,136,000**	**8,229,093,282,477**	**(114,927,146,477)**	**101**
1. Pajak Dalam Negeri	7,845,556,906,000	6,759,927,387,971	(1,085,629,518,029)	86	8,114,166,136,000	8,229,093,282,477	(114,927,146,477)	101
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**10,645,000**	**1,150,000**	**(9,495,000)**	**11**	**0**	**84,510,000**	**(84,510,000)**	**0**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	10,645,000	1,150,000	(9,495,000)	11	0	84,510,000	(84,510,000)	0
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	**7,845,567,551,000**	**6,759,928,537,971**	**(1,085,639,013,029)**	**86**	**8,114,166,136,000**	**8,229,177,792,477**	**(115,011,656,477)**	**101**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	4,639,973,000	4,549,103,803	(90,869,197)	98	4,743,613,000	4,613,189,021	130,423,979	97
1. Belanja Pegawai	988,967,000	958,709,000	(30,258,000)	97	898,142,000	894,047,000	4,095,000	100
2. Belanja Barang	3,461,256,000	3,401,563,681	(59,692,319)	98	3,353,875,000	3,231,312,561	122,562,439	96
3. Belanja Modal	189,750,000	188,831,122	(918,878)	100	491,596,000	487,829,460	3,766,540	99
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **KEMENTERIAN KEUANGAN 015**
ESELON I : **DITJEN PAJAK 04**
SATUAN KERJA : **KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA MEDAN 635595**

Tgl Data : 23/01/25 6:54 AM
Tgl Cetak : 23/01/25 1:50 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	**4,639,973,000**	**4,549,103,803**	**(90,869,197)**	**98**	**4,743,613,000**	**4,613,189,021**	**130,423,979**	**97**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Medan, 23 Januari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

MEIDIJATI
NIP 197510141996032001

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang penting dalam sebuah organisasi, baik institusi maupun sebuah perusahaan. Oleh sebab itu, pentingnya peran SDM dalam organisasi itu sangat diperlukan sebagai unsur utama dan unsur pengendali keberhasilan organisasi.

Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi salah satu cara yang efektif dalam meningkatkan kinerja pegawai KPP Madya Dua Medan dalam memberikan pelayanan dan penghimpunan pajak negara. Hal ini dilakukan KPP Madya Dua Medan melalui pengembangan pengelolaan administrasi yang telah diberikan Direktorat Jenderal Pajak dan sistem Aplikasi yang dikembangkan sendiri yang bertujuan sebagai penunjang dalam pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem Aplikasi yang digunakan diantaranya:

1. Aplikasi Pengelolaan Administrasi seperti: SIKKA, Satu Kemenkeu, SIKEU, SAKTI, SIMAN BMN, e-Performance, HRIS Kemenkeu;
2. Aplikasi Substantif Pelayanan yang meliputi; e-Reg, TPT SIDJP NINE, HELP Mi, RA-DJP, e-Nofa, Aplikasi Pendukung UPDDP dan OM-SPAN;
3. Aplikasi Pengawasan Kinerja berupa, Mandor-DJP, SIDJP, Approweb, Appportal; dan
4. Aplikasi Inovasi KPP Madya Dua Medan: Aplikasi Pengawasan, Analisis, dan Studi Transaksi Afiliasi (PASTI), Maduma, Aplikasi PANJAT (Penjagaan Jatuh Tempo).

D. Kinerja Lain-Lain

Tugas dan peran DJP adalah mengumpulkan pernerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Menteri Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KPP Madya Dua Medan merupakan salah satu unit dalam Direktorat Jenderal Pajak yang turut berperan serta dalam pengumpulan penerimaan negara dari sektor pajak, mencapai target penerimaan dengan hasil yang memuaskan. Selain itu, prestasi lain yang dicapai oleh KPP Madya Dua Medan adalah sebagaimana berikut:

djp

PENGHARGAAN

SERT-581/WPJ.01/SERT/2024

DIBERIKAN KEPADA

KPP MADYA DUA MEDAN

JUARA 1

KANTOR PELAYANAN TERBAIK
TINGKAT KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I
TAHUN 2024

MEDAN, 25 SEPTEMBER 2024

ARRIDEL MINDRA
KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I

Juara 1 Kantor Pelayanan Terbaik di Kanwil DJP Sumut I Tahun 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Berkoordinasi dengan Tim Penilai Nasional:
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia
menetapkan

Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan

sebagai unit kerja berpredikat menuju

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

Jakarta, 13 Desember 2023

MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI INDRAWATI

Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Pencapaian Target Penerimaan Tahun Pajak 2023

KPP Madya Pengemasan Terbaik Mitra KPDDP Jambi Tahun 2024

Unit Kerja dengan Kinerja Penagihan Terbaik Pertama di Kanwil DJP Sumut I Tahun 2023

Unit Kerja dengan Kinerja Pengelolaan Anggaran Terbaik Kedua di Kanwil DJP Sumut I Tahun 2023

Juara 3 Kantor Pelayanan Terbaik di Kanwil DJP Sumut I Tahun 2023

Unit Kerja dengan Pendayagunaan Relawan Pajak Terbaik Tingkat Kanwil DJP Sumut I Tahun 2023

Terbaik Pertama Realisasi Percepatan Penyelesaian DSPC Tahun 2022 Tingkat Kanwil DJP Sumut I Tahun 2022

Unit Kerja Terbaik dalam Pencapaian IKU Efektifitas Penyuluhan Tingkat Kanwil DJP Sumut I Tahun 2022

KPP dengan Publikasi Media Sosial Terbanyak 3 Tingkat Kanwil DJP Sumut I Tahun 2022

Peringkat 2 Pengelola Media Sosial (Taxmin) Terbaik Antar KPP Tingkat Nasional Tahun 2024

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Tantangan global di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial dan plotik menjadi ujian bagi KPP Madya Dua Medan untuk tetap tanggap dalam menghadapi perubahan. Penggunaan teknologi modern dalam aktivitas sehari-hari menjadi ciri khas yang membutuhkan perhatian semua elemen agar tetap relevan.

KPP Madya Dua Medan selalu optimis dalam menghadapi tantangan tersebut dan selalu melakukan evaluasi dan peningkatan akuntabiitas kinerja guna pencapaian hasil yang terbaik

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPP Madya Dua Medan Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024. Pelaksanaan tugas KPP Madya Dua Medan dilaksanakan dalam 10 Sasaran Strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Pelaksanaan kegiatan pada KPP Madya Dua Medan dalam Tahun Anggaran 2024 masih menghadapi hambatan dan tantangan, namun tetap dapat dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan analisis, pencapaian kinerja KPP Madya Dua Medan secara keseluruhan adalah 109,69. Terdapat 18 Indikator Kinerja Utama yang indeks capaiannya ≥ 100% dari target dan 1 Indikator Kinerja Utama dengan capaian realisasi < 100% atau kurang dari target yang ditetapkan. Realisasi kinerja ini dievaluasi, sehingga apabila ada hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya target dapat dibuatkan inisiatif strategi demi perbaikan kinerja di kemudian hari sebagai upaya pencegahan terulangnya kejadian yang sama.

Selanjutnya untuk mengatasi masalah/hambatan di masa mendatang, maka perlu dilakukan penetapan strategi sebagai berikut:

a. meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi semua unit/seksi pada KPP Madya Dua Medan serta unit dan instansi lainnya di lingkungan DJP maupun luar DJP;
b. meningkatkan kualitas pelayanan prima melalui layanan unggulan DJP;
c. meningkatkan kualitas SDM dalam hal kompetensi pelaksanaan tugas dan integrasi moral;
d. menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas perkantoran.

Penyusunan LAKIN KPP Madya Dua Medan ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPP Madya Dua Medan selaku unit operasional Direktorat Jenderal Pajak, sehingga dapat memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala Kantor Pelayanan Pajak

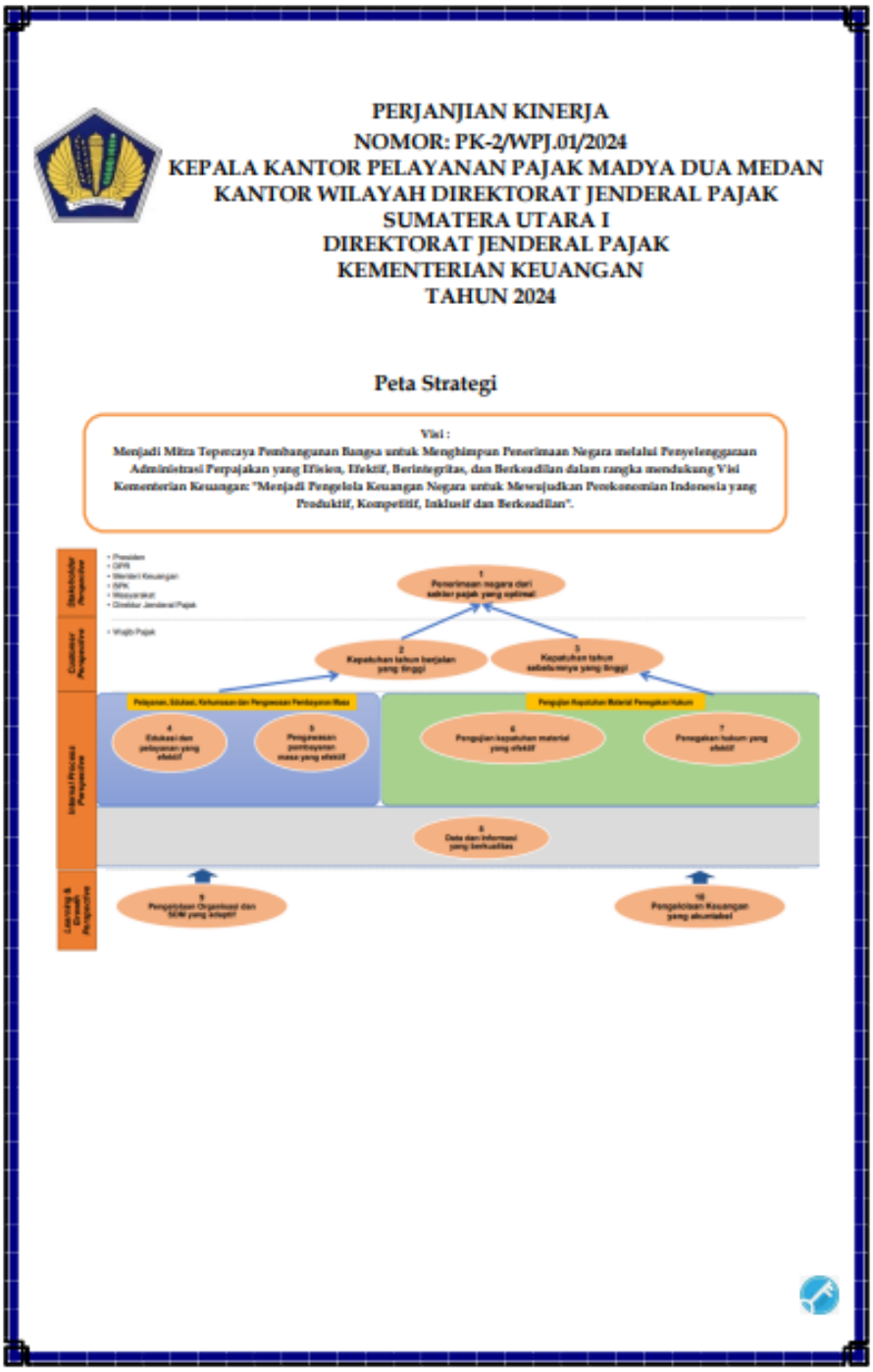

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-2/WPJ.01/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA MEDAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA UTARA I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA MEDAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan produksi Alat Keterangan	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran	
A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	1.162.649.000
1. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	293.516.000
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	869.133.000
B. Program Dukungan Manajemen	Rp	3.593.663.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	2.488.357.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	1.105.306.000
Total	**Rp**	**4.756.312.000**

Medan, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Ditandatangani Secara Elektronik
Arridel Mindra

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan

Ditandatangani Secara Elektronik
Meidijati

ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK-2A/WPJ.01/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor PK-2/WPJ.01/2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Target dan *Trajectory* Indikator Kinerja Utama

Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85	-	-	-	85	85	85	85

Medan, 2 September 2024

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I,

Ditandatangani Secara Elektronik
Arridel Mindra
197008241991031005

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan,

Ditandatangani Secara Elektronik
Meidijati
197510141996032001

ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan Tahun 2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

No	Indikator Kinerja Individu	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85	-	-	-	85	85	85	85

Medan, 2 September 2024

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani Secara Elektronik
Meidijati
197510141996032001

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani Secara Elektronik
Arridel Mindra
197008241991031005